

Journal of Comprehensive Science  
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584  
Vol. 3 No. 4 April 2024

---

**PEMBANGUNAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DI DESA MEKARSARI, KECAMATAN SELAAWI,  
KABUPATEN GARUT**

Dominicus Bertrand Nathaniel Sibarani, Rd. Ahmad Buchari  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
Email: dominicus20001@mail.unpad.ac.id, ahmad.buchari@unpad.ac.id

---

**Abstrak**

Desa Mekarsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut yang terkenal dengan kerajinan sangkar burung berkualitas, serta dinobatkan sebagai desa dengan penghasil kerajinan sangkar burung terbaik se-Kecamatan Selaawi. Berdasarkan penilaian Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa Mekarsari tahun 2023, Desa Mekarsari memiliki nilai IKS dengan presentase 41 %. Dalam pembangunan sosial, menurut Patel (2015) terdapat karakteristik pembangunan sosial yang dilihat dari dimensi kuncinya, yaitu vision, goals, principles, programme type, auspices, views of providers and beneficiaries, dan local and global actions. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dengan teknis analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Berdasarkan teori dimensi kunci karakter pembangunan sosial menurut Patel (2015), dalam implementasi program dan pelaksanaan kegiatan di Desa Mekarsari, masih terdapat kekurangan dari pengadaan anggaran, fasilitas, inisiasi dan keaktifan masyarakat, dan partisipasi kritis dari masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

**Kata Kunci:** Desa Mekarsari; Karakter Pembangunan Sosial; Kesejahteraan Masyarakat.

---

**Abstract**

*Mekarsari Village is one of the villages located in Selaawi District, Garut Regency which is famous for its quality bird cage crafts, and has been named the village that produces the best bird cage crafts in Selaawi District. Based on the 2023 Mekarsari Village Social Resilience Index (IKS) assessment, Mekarsari Village has an IKS score of 41%. In social development, according to Patel (2015), there are characteristics of social development that can be seen from its key dimensions, namely vision, goals, principles, program type, auspices, views of providers and beneficiaries, and local and global actions. This research uses a qualitative research approach with a descriptive type with data analysis techniques using data condensation, data presentation, drawing conclusions and techniques for determining informants using purposive techniques. Based on the theory of key dimensions of social development character according to Patel (2015), in program implementation and implementation of activities in Mekarsari Village, there are still deficiencies in budget provision, facilities, community initiation and activeness, and critical participation from the community in improving community welfare.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan bottom-up telah mendapatkan perhatian yang meningkat sebagai salah satu strategi untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan. Salah satu aspek pembangunan desa berdasarkan Permendesa Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, dijelaskan bahwa salah satu kewajiban desa adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pendekatan bottom-up atau pembangunan partisipatif sebagaimana tertulis dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, merupakan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup pemerintah desa yang mana dijelaskan pada peraturan tersebut bahwa pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang diimplementasikan lebih sesuai dengan realitas lokal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan oleh masyarakat. Selain itu, pendekatan bottom-up atau partisipatif juga dapat memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal serta memperkuat ikatan sosial di antara mereka.

Pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan sosial pada dasarnya melakukan perencanaan, penetapan program dan kegiatan pembangunan, dan pelaksanaan-pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang salah satunya bertujuan untuk memberikan peningkatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga dari kesejahteraannya yang secara umum dilihat dari aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan aspek pemenuhan kebutuhan sosial dapat tercukupi dengan baik. Dalam pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada keterpaduan dalam pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat dari pemerintah, yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosial kulturalnya (Maspaitella, 2014).

Dalam kondisi yang terjadi di lapangan, seringkali pembangunan yang direncanakan tidak mengikuti skala prioritas yang jelas. Sebaliknya, mereka cenderung difokuskan pada pembangunan fisik dan kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, program dan proyek pembangunan dari pemerintah daerah lebih banyak memberikan keuntungan bagi pelaksana dan pejabat di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan (Adnan dan Hamin, 2013). Pembangunan daerah yang terjadi seringkali sarat

akan unsur politis dalam pelaksanaannya, sehingga banyak dari manfaat pembangunan yang dilandaskan pada kepentingan dari kelompok tertentu mengakibatkan pemerataan kesejahteraan dari pelaksanaan pembangunan kurang dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut Tahun 2023, ada indikator penilaian kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan taraf dan pola konsumsi, perumahan, dan sosial. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan taraf kesejahteraan berdasarkan dari penilaian BPS terhadap kesejahteraan sosial Kabupaten Garut, terdapat peningkatan penggunaan teknologi informasi, peningkatan penduduk bekerja dari 1.91 juta jiwa pada tahun 2022 menjadi 1.93 juta jiwa pada tahun 2023, dan penurunan angka ketergantungan pada tahun 2023 dari angka 51 pada tahun 2022 menjadi 47 pada tahun 2023, kemudian dalam pengguna teknologi informasi dari penggunaan telepon seluler meningkat 2,92 juta orang dari tahun 2020 sebanyak 67,32 juta orang menjadi 70,24 juta orang pada tahun 2022.

Peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut, tentunya menjadi sebuah hal yang menarik terhadap kajian yang dilakukan dalam penilaian dari pemerintah desa pada Kabupaten Garut mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengingat dari peningkatan poin-poin penilaian kesejahteraan masyarakat berdasarkan dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023. Salah satu lokus penelitian yang menarik terkait dengan kajian kesejahteraan masyarakat dalam lingkup pemerintah desa adalah Desa Mekarsari yang terletak di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut. Desa Mekarsari merupakan salah satu desa penghasil kerajinan sangkar burung yang ada di Kecamatan Selaawi, sebagaimana Sumber Daya Alam (SDA) unggulan pada Kecamatan Selaawi. Selain itu, berdasarkan dari skor Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa Mekarsari juga mencapai 41 % dan lebih besar dibandingkan penilaian terhadap Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) pada tahun 2023.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Silalahi (2009), metode deskriptif kualitatif ialah: “Penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap sesuatu kondisi.” Penelitian deskriptif kualitatif penulis ambil sebagai maksud dari penelitian ini dari pembahasan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana proses kegiatan pembangunan di Desa Mekarsari, dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Mekarsari.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), yang menjelaskan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat 3 tahap dalam model analisis data kualitatif yang dilakukan pada saat sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data penelitian, yaitu kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Teknik pengambilan data menggunakan teknik purposive, yaitu menurut Sugiyono (2014) yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Vision***

Visi dari pembangunan sosial yang dilaksanakan di Desa Mekarsari berlandaskan pada Visi dari Pemerintah Desa Mekarsari sendiri, yaitu «TERWUJUDNYA DESA MEKARSARI YANG UNGGUL, BERKARAKTER, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN» pada periode selama 5 tahun mendatang. Visi pemerintah Desa Mekarsari ini dilatarbelakangi dari masih banyaknya kekurangan baik dari segi infrastruktur, pemerataan pendapatan penduduk, permasalahan sosial di masyarakat seperti pengangguran, dan akses terhadap institusi pendidikan bagi masyarakat yang masih sangat kurang. Kekurangan ini menjadi salah satu penghambat dari potensi pembangunan yang ada di Desa Mekarsari sebagai salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi kreatif lokal kerajinan sangkar burung untuk bisa dikembangkan dan sebagai salah satu komponen pembangunan mandiri Desa Mekarsari. Oleh karena itu, visi yang diharapkan oleh Pemerintah Desa Mekarsari ini adalah dapat menjadi landasan pembangunan terhadap pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan pemerintah desa, serta bagi kapasitas dari organisasi dan badan yang dinaungi oleh pemerintah desa seperti BUMN, LPM, dan organisasi sosial di masyarakat seperti Karang Taruna dan PKK. Pada pelaksanaannya, Pemerintah Desa Mekarsari menekankan prioritas pembangunan pada saat ini, berfokus pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur perangkat desa, tenaga pendidikan, dan masyarakat melalui rencana sosialisasi dengan melibatkan peran dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sebagai penerapan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### ***Goals***

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Mekarsari, pemerintah desa mengacu pada Goals atau sasaran dari misi yang menjadi penunjang dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah desa
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis penerapan teknologi dan informasi
3. Membangun sinergitas pemerintahan bersama lembaga kemasyarakatan dan komunitas masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) unggulan desa
5. Mengoptimalkan kerjasama kawasan pedesaan

Salah satu isu kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Mekarsari adalah masih tingginya masyarakat yang tidak bekerja di Desa Mekarsari berdasarkan data pada tahun 2021 sebesar 3.629 jiwa dari total penduduk Desa Mekarsari sebesar 6.410 jiwa, atau memiliki presentase 56 %. Tingginya presentase ini menjadi salah satu prioritas pembangunan dari Pemerintah Desa Mekarsari untuk meningkatkan sosialisasi dan upaya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengasah dan membentuk masyarakat agar memiliki bekal, kemampuan, dan keahlian.

Bidang prioritas pembangunan di Desa Mekarsari pada tahun 2023 berjalan saat ini, salah satunya berfokus pada bidang pembangunan pendidikan desa, salah satunya melalui pemberian insentif guru PAUD, RA, dan MDT sebanyak 100 orang dengan

masing-masing mendapatkan 1.200.000,- di tahun 2023 sekarang, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidikan yang ada di Desa Mekarsari, serta penambahan bagi modal anggaran para tenaga pendidikan yang diharapkan dapat digunakan untuk melakukan pemberdayaan secara mandiri pada tiap-tiap individu tenaga pendidikan. Selain itu, bidang pendidikan juga melibatkan peran serta guru dan tenaga pendidikan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 10.000.000,-. Dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, pemerintah desa juga melakukan peninjauan terhadap MDT dan SD yang ada di Desa Mekarsari, dengan total bangunan 4 SD dan 3 PAUD.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Desa Mekarsari, pemerintah desa di tahun 2023 berfokus pada ketahanan pangan berlandaskan pada poin *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan 2, yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Langkah konkrit Pemerintah Desa Mekarsari dijalankan dengan peningkatan produksi tanaman pangan dari penyediaan alat-alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi dan jagung dengan anggaran sebesar Rp 50.000.000,-.

### ***Principles***

Pelaksanaan pembangunan di Desa Mekarsari berdasarkan prinsip partisipatif, yaitu keterlibatan peran dari komunitas masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Partisipasi tersebut dapat diketahui dari peran komunitas masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat pada kegiatan musyawarah dusun yang diadakan oleh 3 Kepala Dusun di Desa Mekarsari pada tiap-tiap dusunnya, kemudian musyawarah desa sebagai partisipan dari kegiatan musyawarah yang diadakan melalui undangan yang disebar oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, partisipasi masyarakat juga dilakukan pada saat pelaksanaan pembangunan desa, contohnya dalam perbaikan jalan di Desa Mekarsari terdapat keterlibatan masyarakat pada perbaikan jalan di RW. 06 Pacarbadak di Dusun 2 yang ditunjuk oleh Ketua RT setempat.

Dalam merencanakan langkah-langkah eksekusi pembangunan, pemerintah desa adanya prinsip pemberdayaan (*empowerment*), yang dilakukan dengan pemberdayaan nelayan, peternak, pemberdayaan terhadap tenaga pendidik, pemberdayaan masyarakat miskin, dan pemberdayaan dalam pemberian penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat. Pemberdayaan diketahui menjadi fokus utama prioritas pembangunan desa untuk tahun ini, yang mana diharapkan dari pemberdayaan tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan pembangunan di Desa Mekarsari secara drastis. Kapasitas individu masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan, sehingga terlebih dahulu dilakukan peningkatan dari segi kompetensi, kapasitas, kesadaran, dan pemahaman masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara aktif dan kritis.

### ***Programme Type***

Menurut Patel (2015), *programme type* dijelaskan sebagai berikut :

*Activities connected with human, social, economic development and community development; services to support vulnerable persons/groups building assets of the poor; local economic development; promote productive employment of the socially excluded;*

*strengthen social capital formation; institutional development and promotion of good governance and democracy.*

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tipe program merujuk pada arah pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu pemerintah, melalui perencanaan kebijakan dengan indikator ketetapan ketercapaian terfokus pada pembangunan yang diharapkan, seperti pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, peningkatan, angkatan kerja. Perencanaan tipe program tidak lepas dari visi dan misi yang ingin dicapai dan diwujudkan, selain itu juga tipe program didasarkan pada model tata kelola pemerintahan yang memengaruhi perencanaan kebijakan pembangunan yang cocok untuk dilaksanakan terhadap peningkatan, pemberdayaan, dan pembangunan dalam ruang lingkup pemerintah lokal.

Penerapan program dan kebijakan di Desa Mekarsari, untuk tiap-tiap program telah diturunkan dan dihimbau dari pemerintah pusat. Contoh program turunan tersebut seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Program PKH yang diatur sarannya dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, PKH yaitu PKH ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga: ibu hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah (5-21 tahun), dan/atau anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen. Selain itu, dalam peningkatan pendidikan dan semangat tenaga pendidik di Desa Mekarsari, pemerintah desa meningkatkan insentif guru pada tahun ini sebesar 500 ribu untuk 38 guru MDT yang ada di Desa Mekarsari. Tipe program di Desa Mekarsari oleh karena itu, dapat dilihat terfokus pada program pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas dan pembinaan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan turunan dari program-program pembangunan desa juga dilakukan dengan melihat kondisi yang ada, seperti pembanguann fasilitas publik untuk gedung serbaguna, pengadaan transportasi darurat desa, pengadaan sarana dan prasarana kantor desa seperti komputer dan printer, pengadaan jaringan internet, dan perbaikan jalan desa pada Dusun II, dan pengadaan sumur bor di 9 titik yang tahun ini telah dibangun 3 titik sumur bor untuk akses air bersih masyarakat.

### **Access**

Menurut Patel (2015), access dalam karakter pembangunan sosial diartikan sebagai berikut :

*Universal coverage but also with a focus on targeted interventions at the poor and socially excluded groups. Universal coverage may involve public, private and community-oriented strategies.*

*Access* diartikan sebagai adanya jaminan akses peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan temarjinal, oleh karena itu pemerintah, swasta, dan komunitas masyarakat perlu membangun strategi dalam memberikan akses pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat tersebut untuk memberikan kesejahteraan. Dalam penerapannya di Desa Mekarsari, penerapan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) diberikan kepada masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin dan membutuhkan, yang mana dilihat dari pendapatan sehari-hari, kondisi tempat tinggal, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tercukupi atau belum. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam memberikan akses pelayanan berupa pengadaan BLT-DD ini masih dirasa kurang tepat sasaran. Hal ini dikarenakan masih banyak kelompok masyarakat yang dirasa lebih layak untuk mendapatkan BLT-DD tidak dapat diberikan seluruhnya karena keterbatasan anggaran BLT-DD tersebut. Selain itu, adanya

unsur subjektifitas dalam pemberian BLT-DD seringkali sulit untuk dihadapi sehingga di masyarakat timbul kecemburuan dari kelompok masyarakat yang tidak menerima BLT-DD.

### ***Auspices***

Dalam pembuatan kebijakan dan program dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa Mekarsari mengacu pada Permendesa No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, juga melibatkan peran pendamping desa di Desa Mekarsari yang diangkat oleh Bupati Kabupaten Garut untuk pendampingan desa yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa.

Peran dari organisasi kemasyarakatan pada pelaksanaan pembangunan desa juga menjadi salah satu ciri dari pendekatan partisipatif dalam kegiatan pembangunan desa sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 sebagaimana dijelaskan bahwa pembangunan partisipatif dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Pada kondisi yang terjadi di Desa Mekarsari, arah kebijakan dari Pemerintah Desa terhadap upaya peningkatan peran partisipatif dalam pembangunan desa dilaksanakan melalui program pemberdayaan lembaga masyarakat melalui dukungan apresiasi bagi lembaga yang ada di desa sebesar Rp 50.000.000, sehingga diharapkan lembaga kemasyarakatan sosial di Desa Mekarsari dapat meningkatkan kinerja kelembagaan masing-masing selain berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan tersebut.

### ***View of Providers and Beneficiaries***

*Providers and beneficiaries* menurut Patel (2015) diartikan sebagai peran dan agen perubahan dalam pelaksanaan pembangunan. Agen perubahan dan pembangunan dalam konteks pembangunan sosial, perlu untuk membangun hubungan dengan masyarakat, juga membangun pandangan yang positif melalui pembangunan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Penyedia pelayanan sosial tidak hanya melibatkan peran pemerintah lokal saja, namun juga dari komunitas masyarakat dalam melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas satu dengan yang lain, keterlibatan peran sektor industri/swasta sebagai role model maupun berperan sebagai pemangku kepentingan dalam konteks pembangunan, dapat memberikan ide dan gagasan dalam prinsip bisnis dalam pembangunan sosial.

Pada pelaksanaan pembangunan di Desa Mekarsari, pembangunan dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang artinya partisipasi masyarakat juga dilibatkan selain daripada peran pemerintah desa dalam berkolaborasi melaksanakan pembangunan. Aktor yang terlibat yang terlibat juga termasuk aktor di lapangan yang melakukan eksekusi terhadap berjalannya program dan kegiatan pembangunan, contohnya di Desa Mekarsari aktor di lapangan ada Ketua Dusun, Ketua RW, Ketua RT, dan peran peninjauan dan pengawasan juga dilakukan dari Kaur Kesejahteraan dalam membuat data laporan Masyarakat Pra Sejahtera (Pra-KS), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS), dan data mata pencaharian penduduk beserta dengan tingkat pendapatan rata-rata setiap tahunnya.

Peran multi aktor dalam pembangunan sosial, merupakan salah satu penerapan dalam perkembangan paradigma governance dalam ilmu administrasi publik, yaitu dalam proses inovasi di sektor publik tidak hanya terfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh organisasi publik, namun seluruh *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan perhatian juga perlu untuk dilibatkan. Salah satu penerapan dari governance pada model pembangunan yang ada di Desa Mekarsari dapat dilihat sebagai model collaborative governance. Collaborative governance menurut Chris & Alison (2008) yaitu model penerapan tata kelola pemerintahan dengan melibatkan aktor non pemerintah melalui forum bersama. Keterlibatan peran multi aktor di Desa Mekarsari memiliki arti bahwa secara tidak langsung maupun langsung, aktor yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, seperti BPD, komunitas masyarakat, RT, RW, dan badan di bawah naungan pemerintah desa merupakan agen perubahan dan pembangunan dalam mewujudkan pembangunan sosial.

### ***Local and Global Action***

Arah pembangunan Pemerintah Desa Mekarsari yang salah satunya berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada visi dari Pemerintah Kabupaten Garut 2019-2024, yaitu “Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera” dengan misi:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kemudian, program dari pemerintah pusat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan dan dirancang melalui Program Inpres Desa Tertinggal, Program Bantuan Pembangunan Desa, Program Pengembangan Kawasan Terpadu, Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan bidang pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan, sasaran penerima bantuan yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diatur berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati antara pemerintah desa dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Mekarsari diketahui masih terdapat penerima dari contohnya BLT-DD sebesar Rp 10 juta rupiah per Kepala Keluarga (KK) yang kurang tepat sasaran bagi keluarga yang memang layak untuk menerima bantuan tersebut.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan sosial di Desa Mekarsari telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa selama tahun 2022-2027. Dalam pelaksanaan kegiatan turunan dari program-program yang ada, pemerintah desa masih menghadapi permasalahan dari

keterbatasan anggaran bantuan pendanaan yang bersifat bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan pendanaan tersebut karena adanya subjektivitas dalam pemberian pendanaan, tidak cukupnya dana anggaran untuk memberikan bantuan secara merata, dan penetapan sasaran penerima bantuan yang masih kurang direncanakan dengan baik. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa untuk saat ini berfokus pada peningkatan kapasitas melalui pemberdayaan baik pemberdayaan kepada masyarakat desa, maupun pemberdayaan kepada perangkat desa. Selain itu, fokus pemberdayaan pemerintah desa juga saat ini diprioritaskan pada penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat yang salah satunya dengan pembinaan mengenai pentingnya pendidikan untuk meningkatkan peluang kesuksesan dan memperluas pengetahuan serta wawasan. Dalam mencapai pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa juga melibatkan peran aktor non pemerintah, seperti contohnya dengan mengundang akademisi dalam kegiatan-kegiatan di Desa Mekarsari. Dari pengadaan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa melaksanakan kegiatan perbaikan jalan, pengadaan sumur bor untuk akses air bersih masyarakat, pengadaan transportasi darurat desa, pembangunan posyandu, dan pengadaan fasilitas umum untuk masyarakat yang salah satunya dengan rencana pembangunan perpustakaan desa di kantor desa.

#### **BIBLIOGRAFI**

- Adi, I. R. 1994. Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial : Dasar-Dasar Pemikiran. Depok: Grafindo Persada.
- Adnan, I. M., & Hamin, S. 2013. Manajemen Strategis Pembangunan Daerah Dan Pedesaan. Edisi Revisi. Bantul: Trussmedia Grafika. <https://repository.uir.ac.id/5651/1/9>. MANAJEMEN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEDESAAN.pdf
- Carr, D. C., & Hendricks, J. 2011. Relevance of social capital and lifestyle for the Third Age. *Gerontology in the Era of the Third Age: Implications and next Steps.*, hal. 207–223. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2011-06362-012&site=ehost-live&scope=site>
- Chris, A., & Alison, G. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18 No.4, hal. 543–571.
- Creswell, John W. 2017. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogya: Pustaka Pelajar.
- Maspaitella, M. J. 2014. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDEKATAN PEKERJA SOSIAL. *Aspirasi*, Vol. 5 No. 2, hal. 157–164. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457>
- Patel, L. 2015. *Social Welfare and Social Development (2nd Edition)*. Edisi 2. Johannesburg: Oxford University Press Southern Africa (Pty) Limited. <https://doi.org/10.1515/9783110815450>
- Purwowibowo, & Wulandari, K. 2023. *Membangun Masyarakat Dinamika Kekinian Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Edisi 1. Bantul: Pandiva Buku. [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/114489/buku\\_fisip\\_bu\\_wulan\\_removed.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/114489/buku_fisip_bu_wulan_removed.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- Robitschek, C., & Keyes, C. L. M. 2009. Keyes's Model of Mental Health With Personal Growth Initiative as a Parsimonious Predictor. *Journal of Counseling Psychology*, Vol. 56 No. 2, hal. 321–329. <https://doi.org/10.1037/a0013954>
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Silalahi U, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- SYAFARI, M. R. 2023. *Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Ketiga. Banjarmasin: Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**